

Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Wuri Wahyuni

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

wuri.wahyudi@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan yang terbit secara resmi selama ini hanya diukur melalui satu dimensi moneter (dimensi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan). Cara ini dipandang tidak cukup mewakili keadaan penduduk miskin. Untuk itu penelitian ini bertujuan melakukan penghitungan kemiskinan dengan melibatkan banyak dimensi (multidimensi) selain dimensi moneter. Pengukuran kemiskinan multidimensi pada penelitian ini menggunakan metode Alkire-Foster yang disesuaikan, dengan 3 dimensi pembentuk, 10 indikator dan 19 variabel titik potong (*cutoff*). Sumber data berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan multidimensi di Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan fenomena perdesaan; kabupaten Tana Toraja menjadi daerah dengan kemiskinan multidimensi tertinggi, dan terendah ada di kota Parepare; standar hidup layak merupakan dimensi yang mempunyai andil terbesar dalam pembentukan kemiskinan multidimensi; persentase penduduk miskin multidimensi lebih besar dari persentase penduduk miskin moneter baik pada level perkotaan perdesaan, maupun pada cakupan kabupaten/kota.

Kata kunci: Kemiskinan multidimensi, Metode Alkire-Foster, Sulawesi Selatan

Multidimensional Poverty In South Sulawesi Province 2020

Abstract: The poverty that has been officially published so far has only been limited to the monetary dimension (the dimension of average expenditure per capita per month). This method is insufficient to represent the condition of the poor. For this reason, this study aims to calculate poverty by involving many dimensions (multidimensional) besides the monetary dimension. This study uses data sources from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) of South Sulawesi Province in 2020 and the adjusted Alkire-Foster for the method, with 3 forming dimensions, 10 indicators, and 19 cutoff variables. The results show that: multidimensional poverty in South Sulawesi in 2020 is a rural phenomenon; Tana Toraja is the Regency with the highest score, and the lowest is Parepare City; The biggest share of dimension in the formation of multidimensional poverty is a decent standard of living; The percentage of the multidimensional poverty is greater than the monetary poverty, both at the urban-rural level and at the district/city coverage

Keywords: multidimensional poverty, Alkire-Foster method, South Sulawesi

PENDAHULUAN

Kemiskinan bukan hanya permasalahan negara-negara berkembang, namun negara maju sekalipun masih mengatasi masalah kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan

masalah global, Dunia internasional memasukkan kemiskinan dalam salah satu target indikator perbaikan dunia yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk (*No Poverty*).

Kemiskinan selama ini dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi pengeluaran. Sejak 1984 hingga sekarang Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan moneter. Sejatinya, melihat masalah kemiskinan dapat dilihat dari berbagai definisi. Penelitian yang dilakukan Sen (1983) menyatakan bahwa kemiskinan diukur dari kemampuan personal, yaitu ketersediaan sumber daya yang dimiliki apakah mampu digunakan sebagai bekal untuk menjalankan kehidupannya,

World Bank (2001) menyatakan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila hilang kesejahteraannya. Kuncoro (2004) juga menyimpulkan bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan maupun pengeluaran semata. Merujuk dari penelitian-penelitian tersebut, maka pengukuran kemiskinan seharusnya tidaklah hanya pada sisi moneter saja. Menurut Bourgignon dan Chakravarty (2003), seseorang dikatakan miskin dilihat dari sisi moneter dan non moneter. Masalah kemiskinan tetap menjadi masalah utama di Indonesia meskipun definisi kemiskinan diperluas, tidak hanya dari sisi moneter saja, World Bank (2007). Terkait semua pernyataan tersebut, maka untuk mengukur kemiskinan di Indonesia perlu dipertimbangkan variabel/dimensi lain dari kemiskinan selain pendapatan dan pengeluaran, yaitu ukuran kemiskinan yang bersifat multidimensi.

Kemiskinan multidimensi diukur dengan suatu indeks yang disebut Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) menggunakan metode *Alkire-Foster(AF)* yang dikaji oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). Beberapa studi tentang kemiskinan multidimensi telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia (antara lain Indriani dan Setiyono (2018); Haris (2018); Sumargo dan Simanjuntak (2019); serta Syapsan, Tampubolon, dan Kornita (2020)). Namun belum ada satupun peneliti yang melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan, dan semua cakupan penelitian yang dilakukan belum menggunakan data terkini (tahun 2020). Kondisi kemiskinan secara moneter di Sulawesi Selatan cenderung sama dengan level nasional, yaitu meskipun angka dan persentase kemiskinan tinggi namun cenderung turun. Pada periode 2011-2020 kemiskinan Sulsel seolah berada pada titik jenuh 8-10 persen. Penduduk miskin dan rentan miskin saling bergantian berada di bawah garis kemiskinan. Tidak diketahui dari dimensi atau sektor mana penduduk miskin ini tidak berkembang, apalagi di Tahun 2020, terjadi pandemi covid -19, yang menyebabkan terpuruknya beberapa indikator strategis diantaranya tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan persentase penduduk miskin secara moneter. Adanya pengukuran kemiskinan multidimensi diharapkan dapat membantu mengidentifikasi permasalahan kemiskinan yang ada guna membuat strategi penganganan kemiskinan yang lebih efektif oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan menghitung dan menganalisis kemiskinan multidimensi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. Angka kemiskinan multidimensi yang dihasilkan juga akan disandingkan dengan angka kemiskinan moneter yang telah ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kondisi kemiskinan dari sudut pandang multidimensi sehingga dapat menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan kemiskinan dan melakukan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah khasanah kajian dan studi tentang tinjauan kemiskinan yang lebih luas.

METODE

Pengkajian untuk pengukuran kemiskinan multidimensi pada penelitian ini sampai dengan level kabupaten/kota se Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Penghitungan juga pada level perkotaan dan pedesaan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data *cross section*.

Data yang digunakan dalam penyusunan agregasi kemiskinan multidimensi merupakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Data kemiskinan moneter menggunakan data kemiskinan resmi yang telah dirilis BPS melalui Berita Resmi, website, maupun publikasi.

Pengukuran kemiskinan multidimensi pada penelitian ini, mengadaptasi metode Alkire Foster, 2011 yang terdiri dari 10 tahap. Tahap 1-7 merupakan tahapan identifikasi, sedangkan tahap 8 merupakan tahapan agregasi. Penjabarannya sebagai berikut:

1. Menentukan unit analisis, berupa individu dan rumah tangga.
2. Memilih dimensi kemiskinan.
3. Memilih indikator untuk setiap dimensi.
4. Menentukan *cutoff* untuk setiap indikator (disebut *cutoff* pertama) yang dapat mengidentifikasi seseorang mengalami deprivasi atau tidak dalam setiap indikator.

Modifikasi metode Alkire Foster dilakukan pada penyusunan poin 1 dan 3, yaitu penyesuaian dengan ketersediaan data yang ada pada SUSENAS .

5. Menentukan penimbang untuk setiap dimensi dan indikator
6. Menghitung skor deprivasi (c_i) untuk setiap unit analisis dengan rumus :

$$c_i = w_1 I_1 + w_2 I_2 + \dots + w_d I_d$$

dimana $I_i=1$ jika seseorang terdeprivasi dalam indikator dan $I_i=0$ jika tidak terdeprivasi. w_i adalah penimbang dari indikator I, dimana $\sum_{i=1}^d w_i=1$

7. Menentukan *cutoff* skor kemiskinan (merupakan *cutoff* kedua(k)). *Cutoff* kedua yang digunakan sebagai penentu akhir status kemiskinan multidimensi individu adalah 30 persen dari total jumlah indikator. Artinya seseorang dapat dikatakan miskin multidimensi apabila terdeprivasi setidaknya 30 persen dari total indikator terbobot.
8. Mengaplikasikan titik potong (k) untuk memperoleh garis kemiskinan kedua. Unit analisis ke- i diidentifikasi mengalami kemiskinan multidimensi ketika $c_i \geq k$. Jika $c_i \leq k$, maka unit analisis tersebut tidak mengalami kemiskinan multidimensi dan tidak dimasukkan dalam penghitungan.
9. Menghitung indeks kemiskinan multidimensi disesuaikan dengan rumus :

$$M_0 = HxA$$

$$H = \frac{q}{n}$$

$$A = \frac{\sum_{i=1}^q c_i(k)}{q}$$

Keterangan:

M_0 = Indeks Kemiskinan Multidimensi Disesuaikan

H = Proporsi penduduk miskin

A = Intensitas Kemiskinan Multidimensi

q = Jumlah penduduk miskin

n = Total penduduk

$c_i(k)$ =Skor deprivasi individu miskin

10. Menerapkan penghitungan multidimensi untuk perkotaan dan pedesaan dengan melakukan tabulasi untuk level perkotaan dan pedesaan terhadap poin 6 hingga 9.
11. Menerapkan penghitungan multidimensi untuk kabupaten/kota dengan melakukan tabulasi untuk setiap kabupaten/kota terhadap poin 6 hingga 9.

Tabel 1. Dimensi, Indikator, Titik Potong (*cutoff*) dan Pembobot yang Digunakan dalam Penyusunan Indeks Kemiskinan Multidimensi

Dimensi	Indikator	<i>Cutoff</i> Indikator Rumah Tangga Miskin	Bobot
Pendidikan	Lama Sekolah	1. Dalam satu rumah tangga pendidikan tertinggi adalah SMP	16,7% (1/6)
	Partisipasi Sekolah	2. Dalam satu rumah tangga ada anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah	16,7% (1/6)
Kesehatan	Tidak Berobat	1. Rumah tangga ada keluhan kesehatan tapi tidak mampu berobat jalan	4,17% (1/24)
	Kecukupan Nutrisi	2. Dalam satu rumah tangga ada anak lahir dengan berat kurang dari 2,5 kg (BBLR)	4,17% (1/24)
		3. Rumah tangga pernah tidak mampu makan sehat dan bergizi	4,17% (1/24)
		4. Rumah tangga pernah tidak makan	4,17% (1/24)
		5. Rumah tangga pernah kehabisan makanan	4,17% (1/24)
		6. Rumah tangga lapar tapi tidak makan	4,17% (1/24)
		7. Rumah tangga tidak makan seharian	4,17% (1/24)
		8. Rumah tangga makan dibawah porsi seharusnya	4,17% (1/24)
Standar Hidup Layak	Akses Listrik	1. Rumah tangga tidak menggunakan listrik PLN	3,70% (1/27)
	Sanitasi	2. Rumah tangga tidak punya fasilitas sanitasi yang layak	3,70% (1/27)
	Air Minum	3. Sumber air minum tidak layak	3,70% (1/27)
	Kondisi Rumah	4. Kondisi rumah tidak layak, lantai tanah/pasir, atap bambu/kayu/jerami/lainnya, dinding kayu/bambu/lainnya	3,70% (1/27)
	Bahan Bakar Memasak	5. Rumah tangga menggunakan bahan bakar memasak berupa minyak tanah, kayu dan arang	3,70% (1/27)
	Aset	6. Rumah tangga tidak punya motor	3,70% (1/27)
		7. Rumah tangga tidak punya kulkas	3,70% (1/27)
8. Rumah tangga tidak punya TV		3,70% (1/27)	
		9. Rumah tangga hanya akses 1 TIK (HP, Komputer, internet)	3,70% (1/27)

Sumber : modifikasi dari Alkire dan Santos (2010)

Nilai kemiskinan moneter diperoleh dari hasil rilis resmi angka kemiskinan 2020 oleh BPS. Pengukuran kemiskinan moneter yang dikeluarkan oleh BPS dihitung menggunakan Garis

Kemiskinan (GK), yang merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Sumber data utama untuk penghitungan kemiskinan moneter adalah dari SUSENAS modul konsumsi dan pengeluaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penghitungan kemiskinan multidimensi menghasilkan tiga ukuran yaitu persentase penduduk miskin multidimensi (H), rata-rata deprivasi antara penduduk miskin (A), dan indeks kemiskinan multidimensi disesuaikan (M_0). Persentase penduduk miskin multidimensi di Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar 11,31 persen atau mencapai 1.008 ribu jiwa penduduk. Sementara angka intensitas kemiskinan multidimensi (A) mencapai 47,63 persen, artinya rata-rata penduduk yang miskin multidimensi mengalami kekurangan sebanyak 5 indikator dari total 10 indikator, sehingga diperoleh indeks kemiskinan multidimensi (M_0) sebesar 5,39 persen.

Berdasarkan klasifikasi daerah, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 3 kali lipat dari persentase penduduk miskin perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di perdesaan mengalami deprivasi dengan indikator yang lebih banyak dari penduduk kota. Temuan ini searah dengan kemiskinan moneter hasil penghitungan BPS, dimana pada periode Maret 2020, persentase jumlah penduduk miskin perkotaan sebesar 4,49 persen dan perdesaan sebesar 11,97 persen. Tabel 2 berikut menampilkan hasil penghitungan kemiskinan multidimensi dan distribusi kemiskinan berdasarkan klasifikasi daerah. Tidak terlihat perbedaan mencolok pada rata-rata deprivasi yang dialami rumah tangga miskin baik di perdesaan maupun perkotaan. Nilai A yang semakin besar menunjukkan semakin banyak jumlah kekurangan dari indikator kemiskinan multidimensi yang dialami oleh orang miskin.

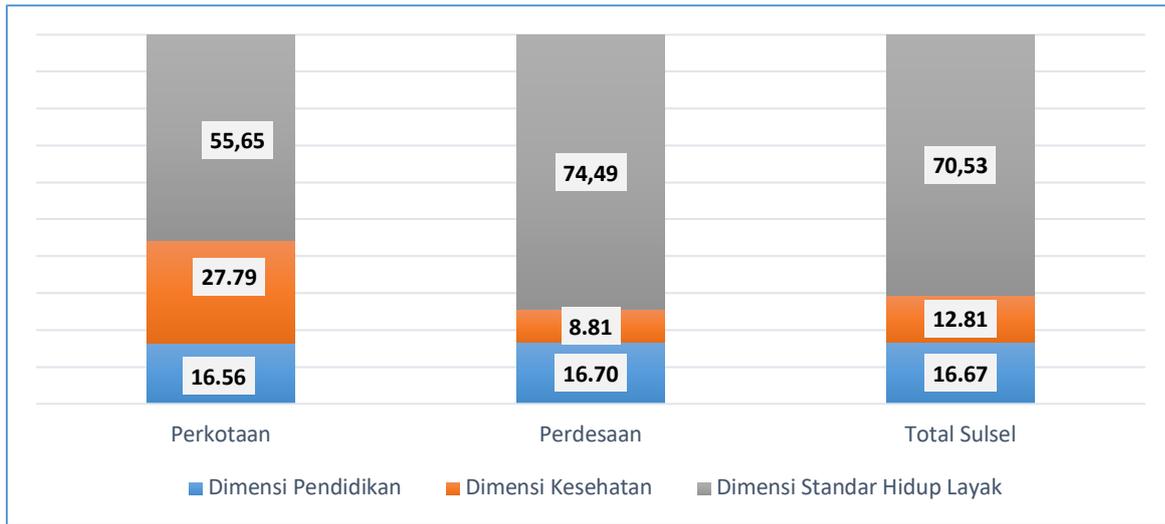
Fenomena lebih tingginya kemiskinan perdesaan dibanding perkotaan ini sejalan dengan penelitian Khan dkk (2011) yang melakukan analisis kemiskinan multidimensi pada 4 provinsi di Pakistan Tahun 1998 sampai dengan 2008 dengan fokus analisis di wilayah perdesaan dan perkotaan. Hasilnya adalah insiden kemiskinan multidimensional perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Fenomena serupa juga dihasilkan dari penelitian Indriani dan Setiyono (2018), dimana wilayah perdesaan memiliki kemiskinan multidimensi yang lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan.

Tabel 2. Kemiskinan Multidimensi dan Distribusi Penduduk Miskin Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020 (%)

Klasifikasi Daerah	H	A	M_0	Distribusi Penduduk Miskin
Perkotaan	5,48	46,58	2,55	21,05
Perdesaan	15,80	47,92	7,57	78,95
Sulawesi Selatan	11,31	47,63	5,39	100

Sumber: Hasil Pengolahan

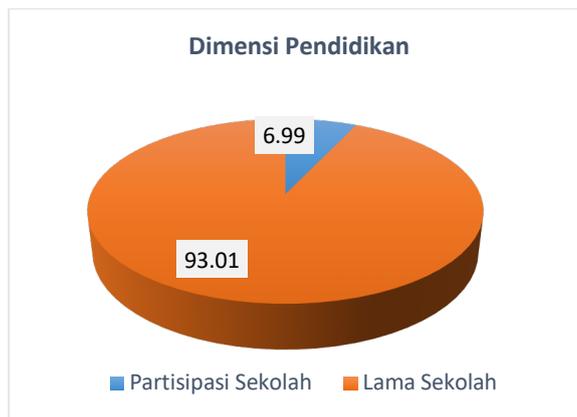
Berdasarkan dimensi pembentuknya, kontribusi masing-masing dimensi pada level perkotaan dan perdesaan dapat menggambarkan seberapa besar sumbangan masing-masing dimensi terhadap tingkat kemiskinan multidimensi. Dimensi standar hidup layak mempunyai kontribusi paling tinggi terhadap kemiskinan multidimensi baik di desa maupun kota, namun persentase kontribusi di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Kondisi ini menunjukkan kurangnya akses rumah tangga terhadap standar hidup layak di perdesaan menjadi poin utama dalam program pengentasan kemiskinan. Sementara kontribusi dimensi kesehatan di level perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan dalam kontribusinya terhadap kemiskinan.



Sumber: Hasil Pengolahan

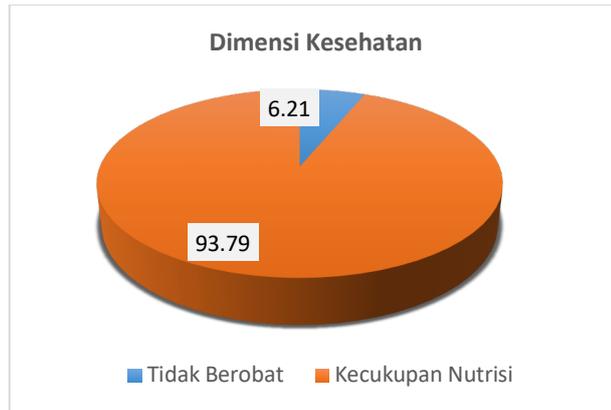
Gambar 1. Kontribusi Setiap Dimensi Terhadap Kemiskinan Multidimensi Sulawesi Selatan Menurut Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020 (%)

Tiga dimensi penyusun kemiskinan multidimensi dibentuk dari indikator-indikator yang disesuaikan. Dimensi standar hidup layak memiliki kontribusi terbesar dibanding dua dimensi lainnya, persentasenya cukup tinggi, mencapai 70,53 persen. Data ini memberikan petunjuk bahwa penanganan kemiskinan bisa diprioritaskan pada perbaikan komponen-komponen standar hidup layak. Pada Gambar 2 , 3, dan 4, menampilkan kontribusi masing-masing indikator penyusun dimensi.



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 2. Kontribusi Indikator Penyusun Dimensi Pendidikan (%)

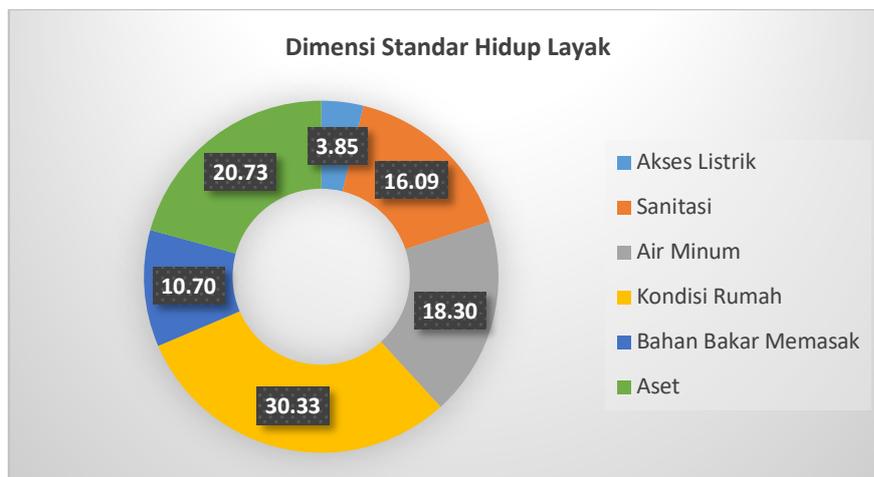


Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 3. Kontribusi Indikator Penyusun Dimensi Kesehatan (%)

Lama sekolah menjadi kontributor terbesar dalam penyusunan dimensi pendidikan, yang dapat dimaknai bahwa pada dimensi pendidikan, mayoritas penduduk miskin terdeprivasi jika pada satu rumah tangga, pendidikan tertinggi hanya sampai SMP (tidak lebih dari 9 tahun). Pada dimensi kesehatan, kecukupan nutrisi mendominasi kontribusi dimensi ini, dimana titik potong kecukupan nutrisi meliputi anak lahir dengan BBLR, rumah tangga pernah tidak mampu makan makanan sehat dan bergizi, rumah tangga pernah tidak makan, rumah tangga kehabisan makanan, rumah tangga lapar tapi tidak makan, rumah tangga tidak makan sehariannya, dan rumah tangga makan di bawah porsi seharusnya..

Pada dimensi standar hidup layak, kontribusi terbesar disumbang oleh indikator kondisi rumah. Penduduk dianggap terdeprivasi pada kondisi rumah jika jenis lantai terlalu luas yang ditempati masih berupa pasir/tanah, beratap bambu/kayu/jerami/lainnya, serta berdinding kayu/bambu/lainnya.



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 4. Kontribusi Indikator Penyusun Dimensi Standar Hidup Layak (%)

Pada cakupan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja menjadi kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin multidimensi tertinggi yaitu sebesar 24,12 persen, sementara Kota Parepare menjadi kabupaten/kota dengan persentase terendah, yaitu sebesar 4,78 persen. Secara umum wilayah kota memiliki persentase kemiskinan multidimensi terkecil di banding wilayah kabupaten.

Ada 16 kabupaten yang memiliki indeks kemiskinan multidimensi di atas angka Indeks kemiskinan multidimensi Sulsel. Kondisi ini secara umum disebabkan besarnya persentase

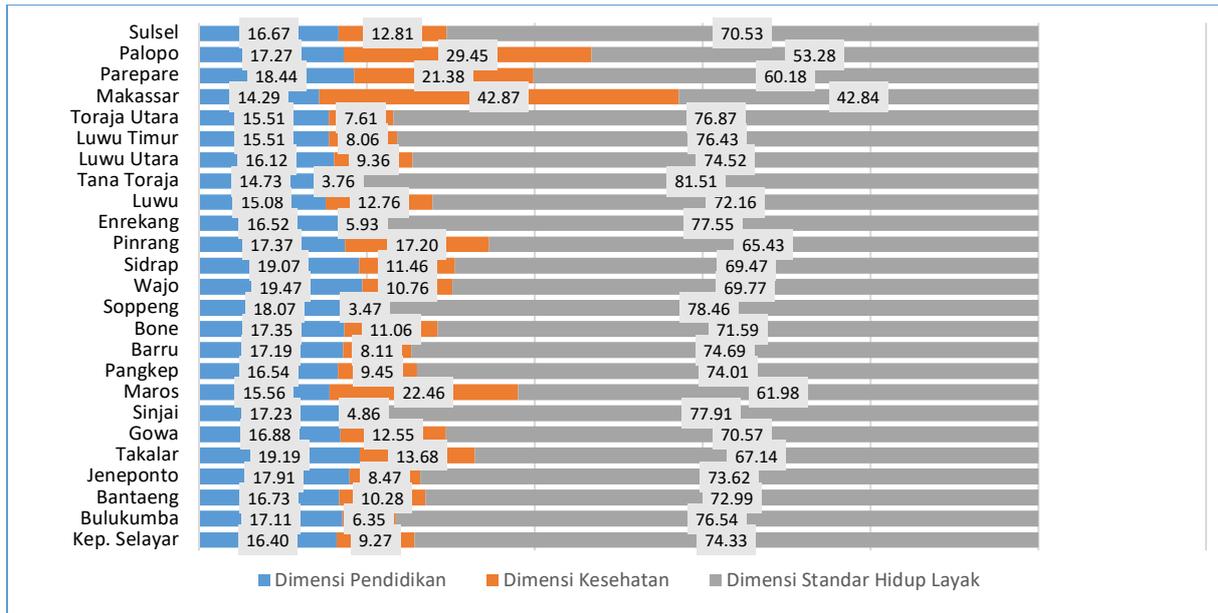
penduduk miskin multidimensi di kabupaten tersebut. Karena jika melihat nilai rata-rata deprivasi penduduk miskin, cenderung seragam di kisaran 41 hingga 52 persen.

Tabel 3. Kemiskinan Multidimensi dan Distribusi Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2020 (%)

Kabupaten/Kota	H	A	M_0	Distribusi Penduduk Miskin Multidimensi
Kep.Selayar	18,64	47,42	8,84	5,74
Bulukumba	13,70	49,27	6,75	3,62
Bantaeng	19,38	48,59	9,42	5,78
Jeneponto	15,96	50,93	8,13	2,32
Takalar	7,76	52,11	4,05	8,30
Gowa	10,70	48,29	5,17	3,32
Sinjai	13,68	50,05	6,84	3,39
Maros	9,61	44,72	4,30	4,71
Pangkep	14,06	47,26	6,65	1,90
Barru	10,93	49,39	5,40	8,87
Bone	11,75	49,50	5,81	3,48
Soppeng	15,46	52,30	8,09	4,57
Wajo	11,56	51,22	5,92	2,43
Sidrap	8,06	51,64	4,16	3,74
Pinrang	9,94	49,49	4,92	2,59
Enrekang	12,59	48,73	6,13	4,98
Luwu	13,80	42,87	5,91	5,62
Tana Toraja	24,12	43,30	10,44	4,50
Luwu Utara	14,43	45,81	6,61	3,23
Luwu Timur	10,70	46,34	4,96	4,54
Toraja Utara	19,73	44,93	8,87	8,04
Kota Makassar	5,26	41,79	2,20	0,69
Kota Parepare	4,78	49,18	2,35	1,11
Kota Palopo	5,98	50,51	3,02	5,74
Sulawesi Selatan	11,31	47,63	5,39	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan

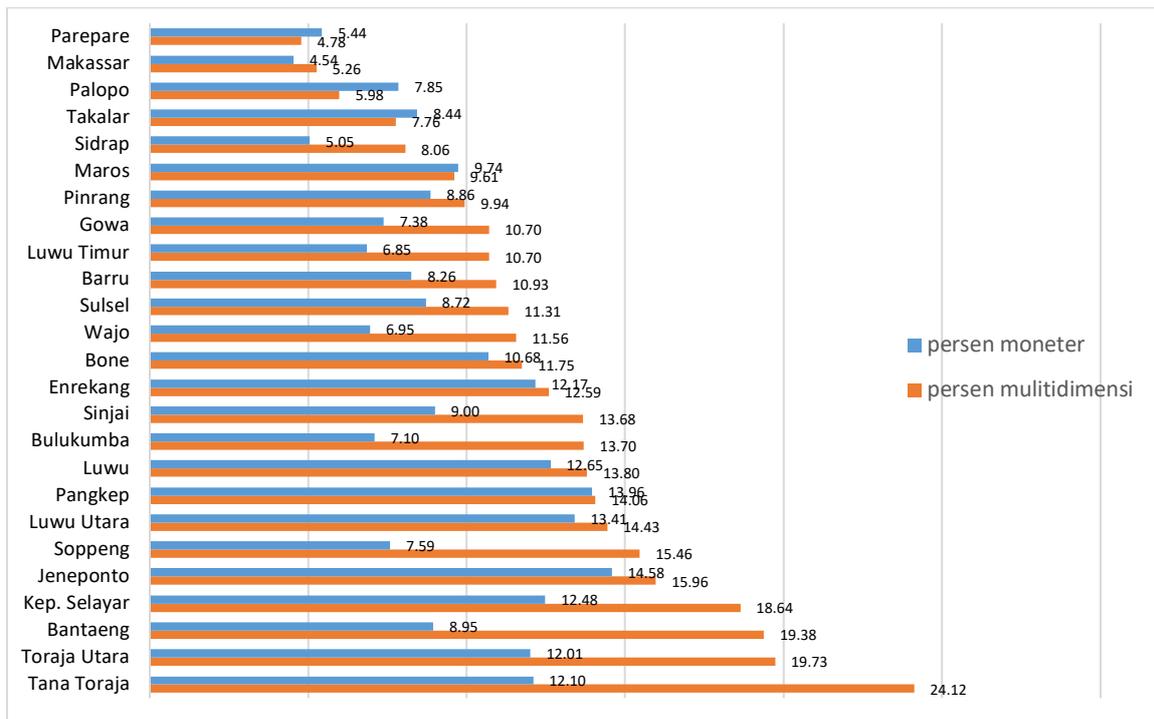
Kontribusi masing-masing dimensi terhadap pembentukan kemiskinan multidimensi pada level kabupaten/kota cenderung sama, yaitu didominasi oleh dimensi standar hidup layak, kecuali Kota Makassar, dimana kontribusi dimensi Kesehatan lebih tinggi dibanding dimensi standar hidup layak. Kontribusi dimensi standar hidup layak di Kabupaten Tana Toraja memiliki persentase tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya, hingga 81 persen, jauh di atas kontribusi dimensi standar hidup layak total Sulsel, yang mencapai 70, 53. Kondisi ini memberikan informasi, bahwa perbaikan sarana prasarana penduduk di Tana Toraja perlu di utamakan.



Sumber: Hasil pengolahan

Gambar 5. Kontribusi Setiap Dimensi Terhadap Kemiskinan Multidimensi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/kota Tahun 2020 (dalam %)

Analisis Kemiskinan multidimensi bukan untuk menandingi atau bahkan menggantikan analisis kemiskinan moneter, melainkan sebagai pelengkap analisis kemiskinan secara menyeluruh dalam rangka pengentasan kemiskinan. Data penduduk kemiskinan moneter kabupaten/kota Tahun 2020 secara umum lebih rendah dibanding penduduk kemiskinan multidimensi. Fenomena ini secara umum memunculkan kemungkinan masih ada penduduk yang tidak miskin secara moneter tapi mengalami deprivasi dalam berbagai dimensi yang lain.



Sumber: Hasil Pengolahan dan Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota (BPS)

Gambar 6. Penduduk Miskin Multidimensi dan Moneter Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (%)

Pada Gambar 6, ketiga wilayah di Sulsel dengan kategori kota yaitu Parepare, Makassar, dan Palopo, tampak memiliki persentase penduduk miskin multidimensi terendah dibanding wilayah kabupaten lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa penduduk pada wilayah kota lebih mampu mencapai kualitas pendidikan, kesehatan serta standar hidup yang lebih baik dibanding wilayah kabupaten.

SIMPULAN

Penelitian pengukuran kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan metode Alkire-Foster yang dimodifikasi, dapat menjadi suatu alternatif pengukuran kemiskinan selain kemiskinan moneter yang telah ada. Hasil pengukuran kemiskinan multidimensi menunjukkan bahwa kemiskinan di Sulsel merupakan fenomena perdesaan, sehingga wilayah perdesaan perlu mendapat perhatian utama dalam pengentasan kemiskinan. Sementara dari tiga dimensi pembentuk kemiskinan multidimensi, tampak bahwa dimensi standar hidup layak memiliki kontribusi yang paling besar dibanding dua dimensi lainnya, baik pada level perkotaan dan perdesaan maupun level kabupaten/kota. Jika menelisik ke dalam masing-masing dimensi, diketahui bahwa indikator lama sekolah mempunyai peranan penting pada dimensi pendidikan, indikator kecukupan nutrisi pada dimensi kesehatan, dan indikator kondisi rumah pada dimensi standar hidup layak. Perbaikan standar hidup layak (kondisi sarana prasarana rumah tangga) perlu menjadi prioritas utama dalam wacana pengentasan kemiskinan di Sulsel. Pada cakupan kabupaten/kota, Tana Toraja menjadi wilayah dengan indeks kemiskinan multidimensi tertinggi di Sulawesi Selatan, penyebabnya juga didominasi oleh dimensi standar hidup layak, yang mempunyai kontribusi tertinggi untuk seluruh Sulsel. Pada penelitian selanjutnya, dapat melibatkan variabel-variabel lainnya yang dianggap paling berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan, dengan melakukan seleksi indikator melalui uji statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., & Santos, M. (2011). *Training Material for Producing National Human Development Report*. Oxford: Oxford Poverty and Human Development Initiative.
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2010). Acute Multidimensional Poverty: A New Index fo Developing Countries. *Human Development Research Paper No. 2010/11 UNDP*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2020, Juli). Profil Kemiskinan Sulawesi Selatan, Maret 2020. *Berita Resmi Statistik*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2021). *Analisis Makro Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Semester 1-2021*. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2021, Februari). Profil Kemiskinan Sulawesi Selatan, September 2020. *Berita Resmi Statistik*.
- Bourguignon, F., & Chakravarty, S. R. (2003). The Measurement of Multidimensional Poverty. *Journal of Economic Inequality*.
- Budiantoro, S., Fanggal, V., Saputra, W., Maftuchan, A., & Artha, D. P. (2013). *Multidimensional Poverty Indeks (MPI) Konsep dan Pengukurannya*. Jakarta Selatan: Prakarsa.
- Haris, M. (2016). Penghitungan Kemiskinan Multidimensi. *Jurnal Paradigma, Vol.5 No.3*.
- Indriani, L., & Setiyono. (2018). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Provinsi Jawa Tengah 2011-2013. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik, Vol.10 No.2*.

- Khan, A., Saboor, A., Mian, S., & Malik, I. (2011). Mapping and Measuring of Multidimensional Poverty in Pakistan: Empirical Investigations. *Pakistan Journal of Life and and Social Science*, Vol. 9 No.2, pp. 121-127.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Niazi, M. I., & Khan, A. U. (2020). The Impact of Education on Multidimensional Poverty across the regions in Punjab. *Journal of Elementary Education*, Vol. 21, No. 1 pp. 77-89.
- Pratiwi, E. D., Ashar, K., & Syafitri, W. (2020). Dampak Kemiskinan Terhadap Pola Mobilitas Tenaga Kerja Antar Sektor di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 15 No. Juni 2020.
- Sen, A. (1983). Poor, Relatively, Speaking. *Oxford Wconomic Papers*, Vol.35, No.2, 153-169.
- Sumargo, B., & Simanjuntak, N. M. (2019). Deprivasi Utama Kemsikinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol.19 No. 2 Juli 2019.
- Syapsan, Tampubolon, D., & Kornita, S. E. (2020). Kemiskinan Multidimensi Dalam Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Riau, Vol.17 No.1 Maret 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.
- World Bank. (2001). *World Development Report 2000/2001, Attacking Poverty*. New York: Oxford University Press, inc.
- World Bank. (2007). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: The World Bank.